

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PELAYARAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL
PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG**

TESIS

Oleh

AB ZULFIQAR

2102190160



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PELAYARAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL
PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

AB ZULFIQAR

2102190160



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AB Zulfiqar

NIM : 2102190160

Program Studi : Hukum Program Magister

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PELAYARAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 20 November 2023



AB Zulfiqar
NIM: 2102190160



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PELAYARAN DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN
DI PELABUHAN SORONG

Oleh:

Nama : AB Zulfiqar
NIM : 2102190160
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 20 November 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 981456/0314086404

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 20 November 2023 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : AB Zulfiqar
NIM : 2102190160
Program Studi : Hukum Program Magister
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG PELAYARAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda tangan

1. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Aartje Tehupeitory, S.H., M.H.

Sebagai Anggota.....

3. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

Sebagai Anggota.....

Jakarta, 20 November 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AB Zulfiqar
NIM : 2102190160
Program Studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran Dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Sorong

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 20 November 2023



AB Zulfiqar
NIM: 2102190160

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia program pascasarjana. Peneliti menyadari bahwa tanpa izin dari Allah Swt. serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama keluarga dan pihak lainnya maka tentunya peneliti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmatNya dalam menyelesaikan tesis ini serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K Harjono S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA selaku direktur program pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
3. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua program studi magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1.
4. Ibu Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing 2
5. Para Dosen Pengajar pada Magister Ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia
6. Ibunda H. Dra. Bonewati Junus, M.Si dan Zainab Thalib Syatha, Alm. Ayahanda Drs. Arsang Sinring dan Alm. Ir. Andi Muhiddin Rauf, MT. Orang tua terkasih yang selalu ada mendampingi dan mendoakan anaknya dan tidak kenal lelah dalam mendidik, menyayangi, mendukung, memberi semangat dan mendoakan peneliti untuk mengejar kemuliaan Ilmu yang bermanfaat.
7. Andi Rizqi Muhiddin, ST., MT. istri tercinta, ananda Abdurrahman, Reyhana, Shofiyah, dan Muammad, terima kasih atas dukungan, semangat, dan doa untuk ayah selama ini.
8. Ibu Jece Julita Piris, SE., M.Si. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong beserta para Kepala Bidang, Kepala Seksi, beserta staf atas dukungan positifnya.

9. Bapak Stevie Manduapessy SE., M.M.Tr. selaku Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor KSOP Kelas I Sorong dan Bapak Arifin, Direktur PT. Mitra Nelayan Cendrawasih atas bantuannya dan selaku narasumber.
10. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, Ibu Capt. Andi Nilawati Yuddin, SE., dan Bapak Mamick Rahardian, S.Si.T atas support dan kebersamaannya selama ini.
11. Semua teman perkuliahan Magister Hukum kelas Pelaut yang selalu memberikan kontribusi dan dukungan positif selama perkuliahan berlangsung
12. Pihak pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga karya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan kampus, nasional dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Jakarta, 20 November 2023

Penulis

Ab Zulfiqar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN . PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT...	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang permasalah.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan kerangka konsep	13
1. Kerangka Teori	13
a. Teori Implementasi.....	13
b. Teori Kewenangan	18
2. Kerangka konsep	31
E. Metode penelitian.....	34
1. Jenis penelitian	34
2. Jenis data.....	35
3. Teknik pengumpulan data.....	37
4. Teknik analisa data.....	38
5. Lokasi Penelitian	40

6. Tahapan Penelitian	40
F. Orisinalitas penelitian.....	41
G. Sistematika penulisan	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	48
A. Tinjauan umum pelayaran.....	48
1. Pelayaran.....	48
2. Kelautan dan perikanan.....	51
B. Tinjauan Umum sertifikat.....	60
1. Pengertian sertifikat.....	60
2. Sertifikat kelaiklautan kapal	62
C. Tinjauan umum kapal	76
1. Pengertian Kapal	76
2. Jenis-jenis kapal laut	77
3. Kapal Perikanan	78
BAB III Korelasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan	91
A. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.....	96
B. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan	101
C. Korelasi PP nomor. 27 tahun 2021 dan PP nomor. 31 Tahun 2021	108
BAB IV Dampak peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021	

tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan dipelabuhan Sorong	111
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan...	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125



ABSTRAK

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN SORONG

Setelah terbitnya Undang-undang Cipta Kerja Republik Indonesia, menimbulkan adanya kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan sertifikat kelaikan kapal perikanan, yang sebelumnya merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan. *Kedua*, Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Pelabuhan Sorong.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif yang menggunakan data sekunder yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan serta pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak dan instansi yang terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini, *pertama* Korelasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan, adalah kedua peraturan tersebut berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengalami perubahan dalam hal penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan. *Kedua*, Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal di Pelabuhan Sorong adalah beralihnya tugas dan tanggung jawab antara kedua instansi pemerintah tersebut, dimana semula kewenangannya tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, kemudian setelah adanya peraturan ini, dialihkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini peraturan pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, khususnya dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di pelabuhan Sorong, sebab tidak tersedianya sumber daya manusia di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakannya

Kata Kunci : Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Implementasi Hukum, dan Pelayaran

Abstract

Title : IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 31 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE SHIPPING SECTOR AND GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE MARINE AND FISHERIES SECTOR IN THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS OF FISHING VESSELS AT SORONG HARBOUR

After the publication of Republic of Indonesia's Omnibus Laws, it gave the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries the authority to issue certificates of seaworthiness for fishing vessels, which previously belonged to the Ministry of Transportation. This reason makes the author interested in conducting a research. The purpose of this study is to determine and analyse the correlation of Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector with Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime Affairs and Fisheries Sector in terms of issuing certificates of seaworthiness of fishing vessels. Second, to explain and analyse the impact of Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector and Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime Affairs and Fisheries Sector in terms of issuing certificates of seaworthiness of fishing vessels at Sorong Port.

The type of research used in this writing is a type of Normative Legal research supported by Secondary data. This research is doing by learning and reviewing regulation and some literature related to this research, interviews were also conducted with government parties and agencies that related to this research.

The conclusion of this research, firstly, Correlation of Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector with Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime Affairs and Fisheries Sector in terms of issuing certificates of seaworthiness of fishery vessels, is that both regulations are related to the duties and authorities of the Department of Transportation and the Maritime Affairs and Fisheries Service have changed. Second, the impact of Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector with Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of the Maritime Affairs and Fisheries Sector in terms of issuing certificates of seaworthiness of fishery vessels at the Port of Sorong is the shift in duties and responsibilities between two government agencies. Previously, the authority of these are the duty and responsibility of the Ministry of Transportation, then after this regulation, it was transferred to the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Until now, these government regulations have not been fully implemented, especially in terms of issuing Certificate of Seaworthiness for Fishing Vessel at the port of Sorong, due to unavailability of human resource at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to implemented that regulations

Keywords: Certificate of Seaworthiness for Fishing Vessel, Legal Implementation, and Shipping.